

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sektor ekonomi menjadi salah satu indikator kemakmuran suatu negara. Tingkat kemakmuran ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan perekonomian negara secara berkesinambungan menuju keadaan perekonomian yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik ditandai dengan meningkatnya jumlah tabungan nasional. Sumber tabungan nasional yaitu tabungan yang berasal dari pemerintah dan tabungan masyarakat.

Tabungan nasional memiliki peran penting dalam laju keberhasilan investasi domestik. Dalam suatu negara, investasi domestik dapat dibiayai dengan dua cara yaitu dengan menggunakan tabungan nasional dan pinjaman luar negeri. Untuk menekan melambungnya jumlah pinjaman luar negeri, maka tabungan nasional harus ditingkatkan. Melalui tabungan nasional, investasi domestik akan makin menggeliat. Hal ini karena proses penyaluran kredit yang dapat mengakibatkan tumbuhnya dunia usaha yang dibangun masyarakat. Oleh karena itu, produk domestik bruto (PDB) juga akan meningkat.

Namun sayangnya, jumlah tabungan nasional di Indonesia menurut Presiden Joko Widodo dinilai masih rendah. Rendahnya tabungan nasional dibuktikan dengan sedikitnya masyarakat yang memiliki rekening tabungan di bank. Hal tersebut dikatakan dalam kampanye Hari Menabung Nasional pada 31 Oktober 2016. Presiden menyatakan bahwa:

“Di tahun 2016, hanya 19 persen dari total masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan di bank. Tingkat kepemilikan tabungan masih rendah yaitu 19 persen dari total penduduk Indonesia di atas 15 tahun. Namun semuanya masih bisa dikembangkan. Melihat potensi dari kalangan pelajar sejumlah 44 juta dan pemuda hingga mahasiswa mencapai 55 juta. Tentu ini akan menjadi target potensial. Dengan menabung sejak dini, kita akan turut untuk lebih produktif. Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Jokowi pada 31 November 2016”.<sup>1</sup>

Berdasarkan pernyataan Presiden di atas, dapat diketahui bahwa tingkat kepemilikan tabungan masyarakat masih sangat rendah yaitu sebesar 19% dari total penduduk. Namun, angka partisipasi menabung tersebut masih dapat dikembangkan menjadi angka yang lebih tinggi.

Dalam rapat terbatas tentang keuangan inklusif di Kantor Kepresidenan, Jakarta pada Selasa 26 April 2016, Presiden Jokowi mengatakan:

“hanya 21,84 persen dari total penduduk Indonesia yang memiliki literasi keuangan yang baik. Data itu menunjukkan masih rendahnya tingkat kepemilikan rekening di bank serta kepemilikan tabungan di lembaga keuangan formal”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161031120957-78-169058/jokowi-bingung-jumlah-pemilik-tabungan-masih-sedikit/> (diakses tanggal 9 Maret 2017)

<sup>2</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/557404/presiden-tingkat-kepemilikan-rekening-bank-masih-rendah> (diakses tanggal 9 Maret 2017)

Dari pernyataan Presiden Joko Widodo di atas diketahui bahwa rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu sebab rendahnya angka partisipasi menabung masyarakat. Atas hal tersebut, Presiden meminta ada terobosan baru terkait dengan perluasan jangkauan ke seluruh Indonesia tentang pendidikan literasi keuangan yang dilakukan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbaiki pemahaman masyarakat mengenai literasi keuangan, sehingga angka partisipasi menabung masyarakat meningkat.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 diperoleh hasil bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 29,66%. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan hasil survei OJK pada tahun 2013 yaitu sebesar 21,84%. Survei dilakukan pada 9.680 responden yang tersebar di 34 provinsi dan 64 kota/ kabupaten di Indonesia. Profil para responden meliputi pengusaha, pegawai dan profesional, pelajar/ mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan, tidak bekerja dan lainnya.

Dari hasil survei tersebut diperoleh hasil bahwa provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan tingkat literasi keuangan yang paling tinggi yaitu sebesar 40%. Kemudian di susul dengan Jawa Barat sebagai posisi kedua dengan tingkat literasi keuangan sebesar 38,70%. Sementara itu di posisi tingkat literasi keuangan terendah di Indonesia adalah Papua Barat sebesar 19,27%.



**Gambar I.1 Indeks Literasi Keuangan Provinsi di Indonesia**

Sumber : <http://www.rappler.com/indonesia/ekonomi/159498-ojk-literasi-keuangan-indonesia-2016> (diakses 20 Maret 2017)

Perbedaan hasil survei mengenai literasi keuangan di setiap daerah ditentukan oleh beberapa penyebab. Salah satunya adalah ketersediaan informasi yang cukup dan ditunjang oleh fasilitas perbankan yang memadai, sehingga memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan tentang keuangan.

Berdasarkan hasil survei OJK dapat diketahui bahwa tingkat literasi keuangan pada masyarakat tergolong masih rendah. Dengan rendahnya pemahaman keuangan ini, masyarakat sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan melalui investasi palsu. Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agus Sugiarto mengatakan bahwa:

“berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2016, tingkat literasi dan inklusi yang ada masih tergolong rendah. Dengan rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan ini masyarakat seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memasarkan produk atau layanan jasa keuangan dengan berbagai cara. Akibatnya seringkali yang disampaikan kepada masyarakat tidak akurat dan tidak jelas yang berpotensi merugikan masyarakat”.<sup>3</sup>

Laporan mengenai penipuan investasi ilegal telah banyak di laporkan oleh masyarakat. Penipuan ini dilakukan karena masyarakat belum sepenuhnya paham mengenai produk keuangan yang diperjualbelikan. Akibatnya, banyak masyarakat yang tertipu dengan banyak kasus yang serupa. Seperti dikutip berita satu:

“Sepanjang tahun 2016, Satgas Waspada Investasi yang dibentuk OJK dan unsur-unsur terkait memperoleh 438 laporan investasi ilegal. Jumlah laporan yang diterima Satgas Investasi terdiri atas 120 entitas. Namun, dari 120 entitas yang diindikasikan melakukan penipuan, hanya 30 entitas yang dapat ditangani Satgas. Hal ini karena sebagian besar identitas entitas tidak lengkap sehingga sulit ditelusuri. Dari investasi ilegal ini Satgas menemukan adanya kerugian masyarakat yang cukup besar. Salah satu kerugian akibat investasi ilegal dari Pandawa Group, Kapolda Metro Jaya mengindikasikan kerugian masyarakat hingga Rp 3 triliun”.<sup>4</sup>

Sesuai dengan pernyataan Satgas OJK di atas, dapat diketahui bahwa banyak kasus penipuan tentang investasi yang terjadi. Kebanyakan dari kasus tersebut tidak dapat ditangani karena kurangnya informasi mengenai profil pelaku penipuan. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Salah satu kerugian yang dialami adalah kehilangan sejumlah dana yang nilainya besar.

---

<sup>3</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/617124/ojk-literasi-keuangan-indonesia-baru-2966-persen> (diakses tanggal 20 Maret 2017)

<sup>4</sup> <http://www.beritasatu.com/ekonomi/415965-literasi-rendah-dan-serakah-picu-fraud.html> (diakses tanggal 21 Maret 2017)

Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK

Anto Prabowo menjelaskan:

“ada lima hal yang memicu maraknya penipuan berkedok investasi illegal. Pertama adalah budaya instan. Kedua, sifat serakah. Ketiga, mudah tergiur oleh kesuksesan semu. Keempat, kurangnya pengawasan. Terakhir, kurangnya penegakan hukum”.<sup>5</sup>

Kecenderungan masyarakat Indonesia yang menginginkan segala sesuatu dapat diperoleh dengan cepat termasuk *return* investasi yang dihasilkan, menyebabkan para masyarakat mengesampingkan nalar atau akal sehat untuk mengenali lebih dalam profil perusahaan yang menawarkan investasi.

Terlepas dari permasalahan literasi keuangan yang rendah, ternyata terdapat faktor internal lain yang menyebabkan rendahnya jumlah tabungan. Salah satunya yaitu kontrol diri. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam kuliah umum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari pada Jumat, 14 April 2017 mengatakan bahwa:

“mahasiswa sekarang ini memiliki sifat-sifat hedonisme, konsumerisme yang merambah dalam gaya hidup sehari-hari. Hal itu yang membuat sebagian mahasiswa di negeri ini kurang progresif, tidak kritis, bahkan ada yang tidak memiliki orientasi jelas, tidak memiliki kepedulian sosial, dan lain sebagainya”.<sup>6</sup>

Dari pernyataan tersebut kehidupan mahasiswa yang konsumernis menyebabkan tingginya nilai konsumsi daripada nilai tabungan. Padahal nilai tabungan akan semakin tinggi jika konsumsi dapat ditekan.

---

<sup>5</sup> <http://id.beritasatu.com/home/ojk-lima-hal-pemicu-maraknya-investasi-bodong/157854> (diakses tanggal 21 Maret 2017)

<sup>6</sup> <http://www.netralnews.com/news/pendidikan/read/68912/mensos.kritisi.gaya.hidup.mahasiswa..ada.apa.sebenamnya> (diakses tanggal 30 Juni 2017)

Dari berbagai kasus yang dijelaskan di atas, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman keuangan atau literasi keuangan yang baik dan melakukan kontrol atau pengendalian diri terhadap keputusan yang nantinya akan diambil. Baik keputusan untuk investasi, menabung, atau memanfaatkan produk perbankan lainnya. Agar tidak terjadi kerugian yang nantinya akan timbul atau dimanfaatkan oleh orang yang hanya menginginkan keuntungan pribadi saja.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan perilaku menabung mahasiswa, antara lain:

1. Jumlah persentase kepemilikan tabungan yang rendah.
2. Literasi keuangan mahasiswa yang kurang baik.
3. Inklusi keuangan yang rendah.
4. Kontrol diri mahasiswa yang masih rendah.

## **C. Pembatasan Masalah**

Melihat banyaknya masalah dan tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga memungkinkan peneliti untuk tidak dapat melakukan penelitian pada semua masalah, maka peneliti membatasi masalah terhadap perilaku menabung mahasiswa yang diukur dengan indikator yaitu: tindakan, target, konteks, dan waktu. Sementara itu, literasi keuangan diukur dengan indikator pengetahuan keuangan, persepsi pengetahuan, keterampilan

keuangan, dan perilaku keuangan. Kemudian, untuk variabel kontrol diri diukur dengan indikator kontrol perilaku (kemampuan mengatur perilaku dan kemampuan memodifikasi stimulus), kontrol pengetahuan (kemampuan memperoleh informasi dan kemampuan melakukan penilaian), serta kontrol keputusan (kemampuan mengontrol keputusan).

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara literasi keuangan terhadap perilaku menabung ?
2. Apakah terdapat pengaruh kontrol diri terhadap perilaku menabung ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara literasi keuangan dan kontrol diri terhadap perilaku menabung ?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Teoritis: penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi guna menambah pengetahuan baru mengenai perilaku menabung yang dipengaruhi oleh literasi keuangan dan kontrol diri.
2. Praktis:
  - a. Bagi Pemerintah



Untuk menambah mata kuliah/ materi pengajaran mengenai literasi keuangan di perguruan tinggi. Selain itu juga melakukan edukasi serta sosialisasi mengenai literasi keuangan, sehingga masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya pengetahuan keuangan sehingga dapat mempergunakan produk keuangan/ perbankan dengan baik.

b. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat mengetahui dan sadar akan pentingnya literasi keuangan sehingga dapat tercipta perilaku menabung yang baik.

c. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan penelitian tentang perilaku menabung yang dipengaruhi oleh literasi keuangan dan kontrol diri.

